

PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI SMPN 6 SAROLANGUN

Hasirah

STAI Ahsanta Jambi

Email : sirahmpdi@gmail.com

Abstrak

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah kepala SMPN 6 Sarolangun dan para orang tua siswa. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis domain, analisis taksonomi, dan analisis komponensial. Berdasarkan hasil analisis data, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pertama, pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di SMPN 6 Sarolangun sudah berlangsung cukup baik yang ditandai dengan telah diterapkannya semua fungsi manajemen dengan baik. Kedua, faktor pendukung pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) di SMPN 6 Sarolangun adalah : semangat dan kerjasama yang baik dari semua pihak dalam struktur madrasah serta dukungan dari orang tua siswa, masyarakat dan pemerintah. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya pemahaman para guru dan masyarakat terhadap konsep manajemen berbasis sekolah (MBS). Adapun solusi yang ditempuh untuk mengatasi faktor penghambat adalah dengan mensosialisasikan konsep manajemen berbasis sekolah kepada para guru dan masyarakat. Ketiga, hasil yang telah dicapai oleh SMPN 6 Sarolangun dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah adalah semakin meningkatnya kualitas pendidikan di sekolah tersebut.

Kata Kunci :Manajemen Berbasis Sekolah (MBS),

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dilihat dari segi pengelolaannya, dapat dikatakan bahwa sekolah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang berada di tengah-tengah masyarakat dengan ciri khas tersendiri. Ciri khas itu antara lain terlihat dari struktur yang dimiliki seperti perencana, pembuat keputusan, dan basis manajemen. Paradigma

ini merupakan jawaban atas tuntutan otonomi pendidikan yang memberikan kesempatan lebih luas kepada sekolah untuk membuat berbagai keputusan yang berkaitan dengan pembaharuan dan inovasi pendidikan, dengan tetap berpegang pada rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah, diharapkan akan mampu mendorong kemajuan sekolah, tanpa meninggalkan nilai-nilai setempat dengan memperluas basis mitra sekolah mulai dari pusat ke sektor masyarakat, pemimpin/tokoh masyarakat, sektor swasta dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM).

Upaya menumbuhkan otonomi pendidikan, salah satunya dapat dilakukan melalui prakarsa masyarakat dan keterlibatan masyarakat. Karena, sudah saatnya segala keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan diambil dan bertumpu pada sekolah dan masyarakat. Kenyataan ini, sesuai dengan paradigma baru dalam pengelolaan sekolah, yaitu melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Pendidikan berbasis sekolah adalah usaha untuk mengadakan konsolidasi ke dalam, dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan dan meningkatkan kualitas hasil yang dipersembahkan kepada bangsa dan negara. Oleh karena itu, usaha untuk memupuk kemampuan mengelola pendidikan berbasis sekolah, akhirnya akan bermuara pada kemandirian sekolah dan masyarakat pendidikan itu sendiri, seperti ketanggapan, kepakaran, dan motivasi yang tinggi, sehingga dapat memberikan kemampuan mengelola lembaga beserta seluruh programnya.

Pemberdayaan sekolah dengan memberikan otonomi yang lebih luas melalui pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), disamping menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat, juga dapat ditujukan sebagai sarana peningkatan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Penekanan aspek-aspek tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah. Misalnya krisis ekonomi yang melanda Indonesia satu dasa warsa terakhir, tidak dapat dihindari dampaknya terhadap dunia pendidikan. Dampak itu antara lain terlihat dari kurangnya kemampuan pemerintah untuk menyediakan dana yang cukup untuk sektor

pendidikan dan menurunnya kemampuan sebagian orang tua untuk membiayai pendidikan anaknya. Kondisi tersebut secara langsung berakibat pada menurunnya kualitas pendidikan dan terganggunya proses pemerataan. Oleh karena itu, perlu melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sekolah. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sekolah, pemerintah akan terbantu baik dalam kontrol maupun pembiayaan sehingga pemerintah dapat lebih berkonsentrasi pada pendidikan masyarakat kurang mampu yang semakin bertambah jumlahnya. Di samping itu, berkurangnya lapisan-lapisan birokrasi dalam prinsip desentralisasi juga mendukung efisiensi tersebut. Keterlibatan kepala sekolah dan guru dalam pengambilan keputusan-keputusan sekolah juga akan mendorong rasa kepemilikan yang lebih tinggi terhadap sekolahnya yang pada akhirnya mendorong mereka untuk menggunakan sumber daya yang ada seefisien mungkin untuk mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan satu paradigma manajemen yang memang harus dilaksanakan oleh semua sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut.

Merujuk kepada uraian dan ayat di atas, dapat dipahami bahwa bila dikaitkan dengan pendidikan, maka kemajuan pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah, tidak hanya tergantung pada pihak sekolah semata, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi dan dukungan masyarakat (orang tua/wali murid), terhadap sekolah itu sendiri. Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan pihak sekolah tidak dapat menjalin hubungan kerjasama dengan masyarakat, maka prospek lembaga pendidikan tersebut akan semakin suram. Karena pendidikan yang berkualitas pengelolaannya tidak bisa diserahkan secara mutlak kepada pihak sekolah sendiri, tetapi perlu dukungan dari berbagai pihak, termasuk pihak orang tua/wali murid itu sendiri. Inilah yang menjadi ciri khas dari manajemen berbasis sekolah (MBS).

Tujuan utama manajemen berbasis sekolah adalah meningkatkan efisiensi, kualitas, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan kualitas diperoleh melalui partisipasi

orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, serta hal lain yang dapat menumbuhkembangkan suasana yang kondusif. Sedangkan pemerataan pendidikan tampak pada tumbuhnya partisipasi masyarakat (E. Mulyasa, 2007:13). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sekolah merupakan hal yang *esensial* untuk keberhasilan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat membawa keuntungan ganda, terutama kepada siswa, yakni timbulnya sikap yang lebih baik terhadap sekolah serta meningkatnya kualitas kelulusan.

Berdasarkan logika di atas, maka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ini seharusnya diterapkan oleh setiap sekolah. Lebih dari itu, jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka secara teoritis Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat menjadi sebuah alternatif bagi sekolah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang lazim dihadapi, seperti masalah dana dan kualitas pendidikan.

Kenyataan yang terjadi dewasa ini menunjukkan bahwa tidak sedikit sekolah yang kekurangan murid, kekurangan sarana dan prasarana, serta kualitas lulusan rendah. Hal ini antara lain disebabkan karena ketidak-mampuan pihak sekolah dalam mengelola pendidikan dengan baik dan kurang jeli dalam memanfaatkan potensi-potensi yang ada di masyarakat untuk turut serta mendukung kelancaran pendidikannya. Dengan kata lain, fakta-fakta yang menunjukkan kelemahan sekolah tersebut disebabkan karena sekolah belum melaksanakan manajemen berbasis sekolah (MBS) dengan baik.

Kondisi-kondisi di atas sebenarnya sudah disadari oleh pihak SMPN 6 Sarolangun. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMPN tersebut. Salah satunya adalah mengubah sistem manajemen yang dipakai dalam pengelolaan sekolah dari manajemen tertutup yang mengecilkan volume partisipasi masyarakat menjadi manajemen terbuka. Perubahan pola manajemen ini sudah dilakukan selama tiga tahun terakhir ini. Dengan manajemen yang terbuka, pihak sekolah melibatkan masyarakat secara lebih aktif-partisipatif dalam pengelolaan sekolah. Upaya ini dilakukan dengan

menjalin kerjasama yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat di mana masyarakat selalu dilibatkan dalam setiap kebijakan yang akandiambil oleh pihak sekolah, pola manajemen seperti ini dikenal dengan istilah Manajemen Berbasis Sekolah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka cukup menarik untuk dikaji bagaimana manajemen berbasis sekolah yang diterapkan oleh pihak SMPN 6 Sarolangun yang terletak di desa Pulau Pandan kecamatan Limun kabupaten Sarolangun sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Hasil kajian itu akan dituangkan ke dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di SMPN 6 Sarolangun.”

PEMBAHASAN

1. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Istilah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan terjemahan dari “*school based management*” yang pertama kali muncul di Amerika Serikat.¹ Menurut Veithzal Rivai, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan sebuah konsep yang menempatkan kekuasaan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan diletakkan pada tempat yang paling dekat dengan proses belajar mengajar (Veithzal Rivai., 2009 : 147) yaitu sekolah. Pengertian senada tentang Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ditulis oleh Supriono. Menurutnya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan sebuah formula baru pengelolaan pendidikan di sekolah yang menuntut peran serta masyarakat secara optimal sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, efisiensi, dan pemerataan (Supriono S., 2001: 5). Sedangkan Mukhtar mengemukakan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai suatu reformasi sistem pengelolaan yang melibatkan desentralisasi *budget* dan keputusan-keputusan tentang personil, kurikulum, serta pengajaran (Mukhtar, Rusmini., 2003:45).

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat dipahami bahwa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan sebuah strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan dari pusat dan daerah ke tingkat sekolah. Dengan demikian, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada dasarnya merupakan sistem manajemen di mana sekolah merupakan unit pengambilan keputusan penting tentang penyelenggaraan pendidikan secara mandiri. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memberikan kesempatan pengendalian lebih besar kepada kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua terhadap proses pendidikan di sekolah mereka.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada prinsipnya menempatkan kewenangan yang bertumpu pada sekolah dan masyarakat, menghindari format sentralisasi dan birokrasi yang dapat menyebabkan hilangnya fungsi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dalam konteks ini, Aris Munandar memandang Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai suatu pendekatan politik, untuk *meredesain* dan *memodifikasi* struktur pemerintahan dengan memindahkan *otoritas* ke sekolah, memindahkan keputusan pemerintah pusat ke *local stakeholders*, dengan mempertaruhkan pemberdayaan sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional (Aris Munandar, 2000:15). Hal tersebut sejalan dengan jiwa dan semangat desentralisasi dan otonomi di sektor pendidikan.

Kemudian Nurkholis (2003:8). menyatakan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan sebuah strategi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan yang meliputi 3 (tiga) komponen pokok sebagai berikut :

- a. Pendelegasian otoritas kepada masing-masing sekolah untuk membuat keputusan tentang program pendidikan sekolah yang meliputi kepegawaian, anggaran dan program
- b. Pengadopsian model pengambilan keputusan bersama pada tingkat sekolah oleh tim manajemen yang meliputi kepala sekolah, para guru, orang tua siswa dan kadang-kadang para siswa dan anggota masyarakat

- c. Suatu harapan bahwa *school-Based Management* akan mempermudah kepemimpinan pada tingkat sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas sekolah.

Pada bagian lain Fattah mengemukakan ada tiga hal menyangkut konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu :

- a. Pengkajian konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) terutama yang menyangkut kekuatan desentralisasi, kekuasaan atau wewenang di tingkat sekolah.
- b. Penelitian tentang program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) berkenaan dengan desentralisasi dan program peningkatan partisipasi *local stakeholder*.
- c. Strategi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) harus lebih menekankan kepada elemen manajemen partisipatif (Nanang Fattah,202:9).

Pengalaman dalam implementasi strategi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang menekankan pada kekuasaan daripada kemampuan profesional (pengetahuan dan keahlian) menyebabkan kegagalan dalam menerapkan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Menurut Umaedi, aspek kemampuan, informasi, dan imbalan yang memadai merupakan elemen-elemen yang sangat menentukan efektivitas program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam meningkatkan kinerja sekolah (Umaedi,, 200:57).

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bertujuan agar otonomi sekolah dan partisipasi masyarakat atau *stakeholder* mempunyai keterlibatan yang tinggi. Kekuatan model keterlibatan tinggi adalah memberikan kerangka dasar bahwa setiap unsur akan dapat berperan dalam meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan kesempatan pendidikan jika unsur-unsur yang terlibat memahami dan berkontribusi terhadap keberhasilan sekolah. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memberikan peluang kepada guru dan kepala sekolah mengelola sekolah menjadi lebih efektif karena adanya partisipasi dan rasa kepemilikan dan keterlibatan yang tinggi dalam membuat keputusan. Dengan demikian, rasa kepemilikan mereka terhadap sekolah menjadi lebih tinggi, yang pada gilirannya akan menimbulkan sikap lebih baik dalam pemanfaatan sumber-sumber daya yang ada untuk dapat mengoptimalkan hasil (*output*). Selanjutnya dengan konsep Manajemen Berbasis

Sekolah (MBS), pengelola sekolah akan mempunyai kendali dan akuntabilitas terhadap lingkungan sekolah. Pengelola pendidikan tingkat pusat hanya berperan dalam melayani kebutuhan sekolah.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menawarkan kebebasan kekuasaan yang besar pada sekolah namun tetap disertai seperangkat tanggung jawab yang harus dipikul, yaitu sikap “*accountability*” dengan intensitas yang tinggi dalam menjamin partisipasi sebagai unsur yang berkepentingan dengan sekolah.

Perihal kekuasaan (*power*) ini, perlu memperhatikan tiga unsur, yaitu: kewajiban (*responsibility*), wewenang (*authority*), dan pertanggungjawaban (*accountability*). Hal ini bermakna bahwa berbagi kekuasaan (*power sharing*) antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sekolah memerlukan penataan secara hati-hati, dan dilaksanakan secara rapi yang dilandasi semangat kerja sama yang mantap dan konsisten dalam kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing.

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat diartikan sebagai pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah (*stakeholder*) secara langsung dalam proses penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Dengan pengambilan keputusan partisipatif sebagai *esensi* manajemen peningkatan mutu sekolah .

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah berupa keterlibatan orang tua siswa dalam pengelolaan sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung yang ditandai dengan sikap mendukung program sekolah. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang dimaksud dengan keterlibatan orang tua siswa sebagai mitra sekolah dalam proses pendidikan, adalah berupa keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan yang diadakan oleh sekolah.

2. Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Sebelum Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dicetuskan di Indonesia, pengelolaan pendidikan yang dianut oleh negeri ini bersifat sangat sentralistik, di mana pemerintah pusat sangat dominan dalam proses pengambilan kebijakan. Sebaliknya, daerah dan sekolah bersifat pasif, hanya sebagai penerima dan pelaksana perintah pemerintah. Pola seperti ini sering mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara kebutuhan riil sekolah dengan kebijakan yang digariskan oleh pusat. Berdasarkan kenyataan ini, maka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) mutlak dilaksanakan di semua sekolah pada setiap tingkatan.

Dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), pengambilan keputusan partisipatif merupakan hal yang penting untuk diperhatikan oleh pimpinan sekolah. Pengambilan keputusan partisipatif itu adalah merupakan cara untuk mengambil keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis, dimana warga sekolah (guru, siswa, karyawan, orang tua siswa, tokoh masyarakat) didorong untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang akan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan sekolah. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa jika seseorang dilibatkan (berpartisipasi) dalam pengambilan keputusan, maka yang bersangkutan akan ada rasa bertanggung jawab dan berdedikasi penuh untuk mencapai tujuan pembuatan keputusan tersebut. Sesuai dengan konsep pendidikan berbasis masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dalam konteks ini,

Gultom menyatakan bahwa salah satu ukuran keberhasilan model pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan sekolah dan pembuatan keputusan-keputusan strategis adalah tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah (R.M.S. Gultom, 1995:5). Partisipasi masyarakat ini sangat penting karena sebagai sebuah lingkungan sosial, masyarakat mempunyai pengaruh dan peranan yang cukup besar terhadap sekolah. Pengaruh dan peranan

tersebut antara lain adalah sebagai arah dalam menentukan tujuan pendidikan, sebagai bahan masukan dalam merumuskan proses belajar mengajar, sebagai sumber belajar, sebagai pendukung dana dan fasilitas lain, serta sebagai laboratorium guna pengembangan sekolah (Abu Ahmadi, 2001:39). Lebih penting dari itu adalah masyarakat merupakan pemakai atau *the user* produk pendidikan yang dihasilkan oleh sekolah (Fuad Ihsan, 2005:91). Sebagai pihak yang akan “mengkonsumsi” produk pendidikan yang dihasilkan oleh sekolah, maka sudah seharusnya masyarakat ikut terlibat dalam menentukan serta merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh sekolah dalam rangka memoles “produk-produk” yang akan mereka pakai. Di sini kelihatan bahwa terdapat hubungan timbal balik yang sangat erat antara sekolah dengan masyarakat.

Mengingat eratnya hubungan antara sekolah dengan masyarakat, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembinaan pola hubungan itu, yaitu:

- a. Perencanaan hubungan sekolah – masyarakat haruslah integral dengan program pendidikan yang bersangkutan.
- b. Setiap pejabat / petugas sekolah terutama guru harus menganggap dirinya adalah petugas hubungan masyarakat.
- c. Program hubungan sekolah – masyarakat harus didasarkan atas kerjasama timbal balik (Yusak Burhanuddin, 2005:94).

Untuk mewujudkan pola hubungan yang baik antara sekolah dengan masyarakat seperti di atas, maka kepemimpinan kepala sekolah mempunyai peranan yang menentukan sebagai satu kekuatan atau kewibawaan di dalam menghimpun dan menggerakkan segala sumber daya di dalam kerja sama dengan masyarakat pendidikan yang lebih luas, serta untuk memperoleh berbagai dukungan sumber daya manusia, dana, serta dukungan informasi (Wahjosumidjo, 2007:332).

Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), antara lain sebagai berikut:

- a. Sekolah dituntut mampu menampilkan pengelolaan sumber daya secara transparan, demokratis, tanpa monopoli, dan tanggung jawab terhadap masyarakat maupun pemerintah.

- b. Peranan pemerintah merumuskan kebijaksanaan pendidikan yang menjadi prioritas nasional dan merumuskan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Akan tetapi sekolah menjabarkannya sesuai dengan potensi dan lingkungan sekolah.
- c. Perlu dibentuk dewan sekolah (*school council*) atau komite sekolah yang keanggotaannya terdiri dari: Guru, kepala sekolah, orang tua peserta didik, dan masyarakat. Dewan sekolah ini berfungsi antara lain: merencanakan, mengambil keputusan, dan mengawasi serta membantu sekolah dalam pengelolaan dan proses kegiatan belajar peserta didik.
- d. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menuntut perubahan perilaku kepala sekolah, guru dan tenaga administrasi menjadi lebih profesional dan manajerial dalam pengoperasian sekolah.
- e. Dalam meningkatkan profesionalisme dan kemampuan manajemen yang terkait dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) perlu diadakan latihan atau latihan lainnya dalam rangka pengembangan profesi serta pemasyarakatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
- f. Efektifitas Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat dilihat dari indikator-indikator sejauh mana sekolah dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, proses pembelajaran, pengelolaan sumber daya manusia dan administrasi.

Agar Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) berjalan dengan baik, di samping itu hal-hal yang telah dikemukakan di atas, ada beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), antara lain sebagai berikut:

- a. Kesamaan Persepsi

Adanya kesatuan persepsi pada seluruh *stake-holders* seperti: guru, kepala sekolah, orang tua siswa, masyarakat dan pemerintah, khususnya jajaran Depdiknas dan Depag. Kondisi ini sangat penting bagi sekolah, sebagai jaminan agar tidak disalahkan jika mengambil kebijaksanaan di luar kebijaksanaan yang ditetapkan dari atas. Dalam suatu diskusi tentang Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), banyak kepala sekolah menyatakan apakah pejabat Kanwil/Kandep

Diknas tidak marah, jika sekolah mengambil langkah-langkah yang menyimpang dari petunjuk yang ada. Pada saat ini sekolah sebagai UPT dianggap sebagai pelaksana teknis yang langkah kebijaksanaan sudah ditentukan. Untuk itu, diperlukan sosialisasi yang intensif, agar semua pihak paham bahwa pembinaan sekolah sudah berubah dengan menggunakan paradigma Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

b. Kejelasan Koridor Kebijaksanaan

Perlu dirumuskan secara jelas, wilayah mana yang menjadi ruang gerak sekolah dan wilayah mana yang tidak boleh. Misalnya, sekolah diberi kewenangan mengelola kurikulum nasional, apakah sekolah boleh mengatur jam pelajaran, bolehkah mengatur di kelas mana pelajaran diberikan dan tidak diberikan ? Jika sekolah dibolehkan menggali sumber dana dari masyarakat, bagaimana rambu-rambunya ? Bolehkah sekolah menyewakan ruangan ? Bagaimanakah pola pertanggung jawaban keuangan sekolah ? Dalam ketenagaan bolehkah sekolah mengangkat guru tetap sekolah ? Dan sebagainya.

c. Perubahan Pola Hubungan Sub-Ordinasi Menjadi Kesejawatan

Selama ini hubungan sekolah dengan birokrasi di Kanwil/Kandep Dinas Diknas adalah hubungan yang bersifat sub-ordinasi. Dengan penerapan paradigma Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), pola hubungan birokrasi (Kanwil/Kandep Dinas) dengan sekolah harus dirubah menjadi pola hubungan kesejawatan. Kita harus menganggap sekolah menjadi semacam unit otonom dari birokrasi Kanwil/Kandep Dinas, Pengawas Diknas sebagai representasi wakil Kanwil/Kandep, dan bukan lagi berperan sebagai pemeriksa kinerja sekolah, kemudian memberi nilai, akan tetapi Kanwil, Kandep, Pengawas berperan sebagai konsultan di sekolah.

d. Perubahan Sikap dan Perilaku

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menuntut perubahan perilaku, baik pimpinan dan jajaran sekolah, jajaran birokrasi Depdiknas serta masyarakat. Pimpinan sekolah harus mengubah sikap dari sekedar pelaksana menjadi *interpereneur*, yang memiliki visi yang jelas dan keinginan yang kuat untuk mengembangkan sekolah. Sekolah harus dipahami sebagai suatu amanat

yang diserahkan untuk dikembangkan. Prestasi kerjanya diukur dari perkembangan sekolah yang dipimpin dan buka dari ketidakpernahan melanggar aturan. Adanya suatu filosofi, lebih baik menunggu perintah dari pada membuat kesalahan harus diubah menjadi lebih baik salah dari pada tidak berbuat sama sekali.

e. Deregulasi

Dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), masih banyak aturan yang perlu ditinjau kembali. Hal ini sangat wajar, karena penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebenarnya suatu perubahan yang sangat mendasar terhadap paradigma sekolah. Jika selama ini kita menggunakan paradigma *input-output production function*, sehingga melahirkan keyakinan dengan memperbaiki input, Misalnya guru, sarana dan sebagainya. Secara otomatis outpunya akan meningkat. Dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) kita memahami sekolah sebagai unit manajemen yang utuh, sehingga memerlukan *treatment* khusus dalam upaya pengembangannya. Memang dalam proses pendidikan terdapat berbagai input, tetapi interaksi antar input itu sangat mungkin berbeda untuk setiap sekolah dan itulah yang melandasi keyakinan bahwa pengambilan keputusan dalam merancang dan mengelola dilaksanakan pada level sekolah.

f. Transparansi dan Akuntabilitas

Bila kita anggap sekolah sebagai perusahaan, dan bila kita ingin menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada sekolah, maka sekolah tersebut menjadi perusahaan publik. Walaupun sekolah tersebut adalah sekolah negeri, maka nantinya sekolah tersebut bukan lagi semata-mata milik pemerintah, tetapi milik masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijaksanaan dan kegiatan sekolah harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Masyarakat harus dapat mengetahui apa dan bagaimana kebijaksanaan sekolah serta implikasinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan fokus penelitian, temuan lapangan dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di SMPN 6 Sarolangun sudah berlangsung cukup baik. Hal ini ditandai dengan telah diterapkannya semua fungsi manajemen, meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), pengawasan (*controlling*), dan evaluasi (*evaluating*).
2. Faktor pendukung pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) di SMPN 6 Sarolangun terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa semangat yang tinggi dan kerjasama yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam struktur sekolah. Sedangkan faktor eksternal berupa dukungan dari orang tua siswa, masyarakat dan pemerintah. Sementara itu, yang menjadi faktor penghambat juga berasal dari faktor internal, yaitu kurangnya pemahaman para guru terhadap konsep manajemen berbasis sekolah, dan faktor eksternal, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep manajemen berbasis sekolah. Adapun solusi yang ditempuh oleh pihak SMPN 6 Sarolangun untuk mengatasi faktor penghambat yang ditemui adalah dengan mensosialisasikan konsep manajemen berbasis sekolah kepada para guru dan masyarakat.
3. Hasil yang telah dicapai oleh SMPN 6 Sarolangun dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) adalah terlaksananya manajemen berbasis sekolah (MBS) dengan baik dan semakin meningkatnya kualitas pendidikan di sekolah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, abu, Nur Uhbiyati, (2001), *Ilmu Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta,
- Ahmad, A., & Murtopo, A. (2019). Efektivitas Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Layanan Mutu Pendidikan. *Edukasi*, 10(1).
- Burhanuddin, Yusak (2005), *Administrasi Pendidikan*, Bandung : Pustaka Setia,
- Fattah, Nanang, (2002), *Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management)*, Bandung: Andira.
- Fuad Ihsan, (2005), *Dasar-dasar Kependidikan*, Jakarta : Rineka Cipta,

- Gultom,R.M.S. (1995), *Partisipasi Rakyat dalam Pembangunan*, Salatiga : UKSW
- Veithzal Rivai, Sylviana Murni, (2009), *EducationManagement ; Analisis Teori dan Praktik*, Jakarta : RajaGrafindo Persada,
- Mukhtar, Rusmini, Samsu, (2003), *Sekolah Berprestasi*, Jakarta : Nimas Multima
- Mulyasa,E.(2007), *Manajemen Berbasis Sekolah ; Konsep, Strategi dan Implementasi*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Munandar,Aris, (2000), *Manajemen Berbasis Sekolah*, Jakarta : t.p,
- Nurkolis, (2003),*Manajemen Berbasis Sekolah (Teori, Model dan Aplikasi)*, Jakarta : Gramedia.
- Putra, E. S. I., Ahmad, K., & Hasnawati, (2019) F. Learning Model Of Reflective Inquiry Based On Environment As A Source Of Learning Ips Education.
- Supriono S., Achmad Sapari (2001), *Manajemen Berbasis Sekolah*, Surabaya : SIC, ,
- Sumarno, “Menuju Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah”, *Makalah* dalam [http://www. Wikipedia.com](http://www.Wikipedia.com).
- Umaedi, (2000), *Manajemen Berbasis Sekolah*, Jakarta : Rineka Cipta,,
- Wahjosumidjo, (2007), *Kepemimpinan Kepala Sekolah ; Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.